

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Nomor 9).

Davidson, S. (2008). *HAK ASASI MANUSIA*.

Krisnayuda, B. (2017). *PANCASILA & UNDANG-UNDANG RELASI DAN TRANSFORMASI KEDUANYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*.

Ismiati, S., (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan Perundang-Undangan :

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAAN ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS PENGEMBANGAN PESANTREN

Jurnal :

Carma, G. (2018). Teori Perlindungan Hukum. *Bentuk-bentuk PCarma, GOD, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018, 17-51*erindungan Hukum, 17-51.

CME-RJ. (2019). NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN. *Intoxicacion As Frecuentes Y Sus Principales Factores Influyentes En Niños Atendidos En El Servicio De Pediatria Del Hospital Provincial General Docente Riobamba Periodo Enero-Agosto Del 2013, 1(006344), 80.*

Gunadi, I., & Group, K. P. (n.d.). *PENGERTIAN PENGANIAYAAN KBBI*. 1-40. Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y.

- (2021). *Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*. 71(4), 63–71.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Lamintang. 2002. (2017). *P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung Amrico*.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190.
- Lestia Inggrit Maharani. (n.d.). *SEKOLAH RAMAH HAM*. 351–361.
- Mathematics, A. (2016). *TEORI KEMANFAATAN*. 4(November), 1–23.
- Nandita, S., & Batubara, G. T. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 53-67
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.
- Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(4).
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Surabaya, U. N., Surabaya, U. N., & Wetan, L. (2021). *KEKERASAN DALAM SENIORITAS DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Maisandra Helena Lohy 1 , Farid Pribadi 2*. 5(1), 159–171.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022).

PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Wintoko, D. H., Hermawan, J., Hisyam, M., & Pambudi, R. N. (2018). Penganiayaan Sesama Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Lontar Merah*, 1(1), 31–37.

Sumber Lain :

Ani Mardatila. (2022). *Alasan Gontor tidak proses hukum penganiaya tewasnya santri dan pengakuan tidak jujur ke keluarga korban*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/alasan-gontor-tidak-proses-hukum-penganiaya-tewasnya-santri-dan-pengakuan-tidak-jujur-ke-keluarga-korban>

Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Nomor 9).

Docente Riobamba Periodo Enero-Agosto Del 2013, 1(006344), 80.

Destyan H. Sujarwoko. (2022). *Polisi tetapkan tersangka kasus penganiayaan santri gontor*. <https://jabar.antaranews.com/berita/404329/polisi-tetapkan-2-tersangka-kasus-penganiayaan-santri-gontor?page=all>

Pebrianti, C. (n.d.). “2 Penganiaya Santri Ponpes Gontor hingga Tewas Divonis 8 dan 4 Tahun Penjara.” <https://www.suara.com/tag/pondok-pesantren-gontor>

Terbaik, P. (2021). *5 Peraturan ketat gontor*. https://panduanterbaik.id/peraturan-ketat-pesantren-gontor/#Peraturan_Ketat_Berbahasa_di_Gontor

UNICEF.(2018). *Konvensi Hak Anak*.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Ani Mardatila. (2022). *Alasan Gontor tidak proses hukum penganiaya tewasnya santri dan pengakuan tidak jujur ke keluarga korban*.

Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9).

Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(1), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>

Carma, G. (2018). Teori Perlindungan Hukum. *Bentuk-Bentuk PCarma, GOD, ‘Teori Perlindungan Hukum’, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018, 17–51*erlindungan Hukum, 17–51.

CME-RJ. (2019). NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN. *Intoxicacion As Frecuentes Y Sus Principales Factores Influyentes En Niños Atendidos En El Servicio De Pediatria Del Hospital Provincial General Docente Riobamba Periodo Enero-*

Agosto Del 2013, 1(006344), 80.

Davidson, S. (2008). *HAK ASASI MANUSIA*.

Destyan H. Sujarwoko. (2022). *Polisi tetapkan tersangka kasus penganiayaan santri gontor.*

Gunadi, I., & Group, K. P. (n.d.). *PENGERTIAN PENGANIAYAAN KBBI*. 1–40.

Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). *Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*. 71(4), 63–71.

Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.

Krisnayuda, B. (2017). *PANCASILA & UNDANG-UNDANG RELASI DAN TRANSFORMASI KEDUANYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*.

Lamintang. 2002. (2017). *P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung Amrico.*

Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review, 1(02)*, 183–190.

Lestia Inggrit Maharani. (n.d.). *SEKOLAH RAMAH HAM*. 351–361.

Mathematics, A. (2016). *TEORI KEMANFAATAN*. 4(November), 1–23.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2008)*.

Pebrianti, C. (n.d.). “2 Penganiaya Santri Ponpes Gontor hingga Tewas Divonis 8 dan 4 Tahun Penjara.”

Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39*, 1–45.

Surabaya, U. N., Surabaya, U. N., & Wetan, L. (2021). *KEKERASAN DALAM SENIORITAS DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Maisandra Helena Lohy 1 , Farid Pribadi 2*. 5(1), 159–171.

Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia, 2(2)*, 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>

Terbaik, P. (2021). *5 Peraturan ketat gontor.*

UNICEF. (2018). *Konvensi Hak Anak*.

V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Waluyo, B. (2016). *METODE PENELITIAN HUKUM*.

Wintoko, D. H., Hermawan, J., Hisyam, M., & Pambudi, R. N. (2018). Penganiayaan Sesama Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Lontar Merah*, 1(1), 31–37.